

Sosiologi, Ilmu Ekonomi, Dll, Masih Perlukah?

* Catatan Buat Ariel Heryanto

BARANGKALI para sarjana ilmu politik membaca tulisan Saudara Ariel Heryanto (AH) di harian ini tanggal 23/9/1994 akan memberikan reaksi bermacam ragam. Kemungkinan reaksi yang pertama adalah "marah," karena ada orang yang memperdebatkan dan meragukan manfaat ilmu politik.

Kemungkinan reaksi kedua adalah dengan menyatakan bahwa AH tidak tahu ilmu politik sehingga dia mengajukan ungkapan yang sinis terhadap ilmu politik karena ketidaktahuannya tersebut.

Kemungkinan reaksi ketiga adalah melihat bahwa ungkapan dan penilaian AH terhadap ilmu politik merupakan "tantangan" yang perlu dihadapi, kemudian mengacu diri apakah benar yang diutarakan oleh AH.

Saya menempatkan diri pada posisi ketiga dan mencoba menjelaskan apa sebenarnya politik, ilmu politik, ruang lingkup, fungsinya, dan lain sebagainya.

Politik dan ilmu politik

Banyak orang salah mengerti, atau sedikit mengerti tentang apa itu politik dan ilmu politik. Bagi mereka yang memahami ilmu politik dengan benar, politik diartikan sebagai "siapa yang memperoleh apa, kapan, dan bagaimana," seperti yang diungkapkan oleh Harold Laswell. Atau yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh David Easton (1953, 1965a, 1965b), sebagai "*authoritative allocation of values for a society*", bagaimana mengalokasikan nilai-nilai secara otoritatif bagi sebuah masyarakat.

Otoritatif artinya sekali keputusan untuk mengalokasikan nilai-nilai tersebut ditentukan ma-

Oleh Afan Gaffar

ka sifatnya mengikat (*binding*), negara mempunyai kemampuan untuk memberikan paksaan/sanksi fisik agar orang mematuhi.

Apa sajakah yang disebut bernilai, yaitu yang selalu dicari, dipertaruhkan, dan diperebutkan oleh orang, yang merupakan barang yang teramat langka di dalam kehidupan sehari-hari?

Orang mempergunakan berbagai macam cara untuk memperolehnya, dan tidak jarang puluhan bahkan ratusan ribu nyawa dikorbankan untuk itu.

Orang bertindak politik karena kelangkaan dari barang tersebut. Oleh karena itu orang bertindak politik sama dengan orang bertindak ekonomi, karena kelangkaan (*scarcity*) barang dan jasa. Barang-barang yang langka tersebut oleh Karl W. Deutsch (1974) diidentifikasi ke dalam delapan jenis, yaitu *power, enlightenment, respect, rectitude, wealth, health, skill, dan affection*. Ada juga yang menambahkan dengan *freedom and order*.

Semu perlaku manusia yang berkaitan dengan hal-hal tersebut adalah perlaku politik. Tidak ada yang dapat menghindarkan diri dari politik. Udara yang kita hisap, air yang kita minum, makanan yang kita telan, tanah yang kita pijak, semuanya mempunyai makna politik selama manusia memiliki kepentingan yang menyangkut hal-hal tersebut. Oleh karena itu kalangan filsafat klasik telah mengungkapkan bahwa manusia itu "*zoen politicon*".

Dengan ilmu politik diharapkan untuk melatih orang bagaimana menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan benar.

Dengan ilmu politik diajarkan bagaimana demokrasi dapat/tidak dapat tumbuh, berkembang, dalam sebuah masyarakat/negara. Dengan ilmu politik disebarluaskan pula nilai-nilai dan norma-norma yang berkaitan erat dengan rasa cinta kepada bangsa dan tanah air.

Apakah hal itu kemudian berhasil? Tidak ada seorang pun yang dapat memberikan jawaban yang pasti dan benar. Di negara yang sudah memiliki tradisi keilmuan yang kuat seperti di Eropa dan Amerika Utara kalangan ilmuwan politik dan masyarakat luas menyatakan dengan tegas bahwa mereka berhasil sebagaimana halnya dengan kalangan ilmuwan lainnya (Albert Somit and Tannenhaus, 1965; Dwight Waldo, 1975).

Di Dunia Ketiga yang terutama belum memiliki tradisi keilmuan yang kuat tentu saja hal itu masih jauh panggang dari api. Apakah hal itu semata-mata tanggung jawab ilmuwan politik? Sama sekali tidak karena hal itu merupakan tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan sebagaimana halnya dengan gagalnya ilmu-ilmu lainnya.

Di Indonesia

Saya percaya saudara AH memahami betul bagaimana sulitnya melakukan penelitian politik di Indonesia karena begitu kuatnya dominasi negara dalam segala aspek kehidupan kita. Cobalah Anda melakukan penelitian mengenai perilaku politik masyarakat, apakah yang berkaitan dengan kebijaksanaan pemerintah, pandangan, sikap, dan orientasi mereka tentang negara, apa dan bagaimana perilaku warga negara dalam beberapa pemilihan umum yang lalu.

Saya dapat menyatakan de-

ngan tegas bahwa izin dari kantor sospol tak akan keluar. Anda ingat peristiwa SUBURI tahun 1968 kan? Saya sudah mengeluhkan hal ini di mana-mana, dalam pertemuan AAPI, dan bahkan kepada Wakil Ketua DPR zamannya Pak Syaiful Sulun di Jakarta.

Ilmuwan politik di Indonesia tak usah mencoba memberikan jawaban atas masalah yang sangat pelik dan kompleks seperti yang Anda ajukan, melakukan penelitian dasar saja tidak bisa. Pertanyaan yang Anda ajukan biasanya didiskusikan secara terbatas di beberapa seminar, itu pun harus mengurus izin. Di universitas yang cukup mapan seperti UGM, dan UI, mendiskusikan hal-hal yang Anda persoalkan tidak terlambau sulit, apakah di ruangan kelas ataukah dalam seminar. Akan tetapi di perguruan tinggi lainnya birokrat universitasnya sendiri tidak jarang sudah pada takut.

Bukan hanya persoalan ilmu politik

Persoalan yang diajukan AH sebenarnya bukan hanya persoalan ilmu politik, tetapi juga persoalan semua bidang ilmu sosial dan kemanusiaan yang lainnya di negeri ini. Kalau orang mempersoalkan pengadilan sebagai sebuah teater apakah itu semata-mata persoalan ilmu politik? Bagaimana dengan ilmu hukum? Bagaimana dengan sosiologi, antropologi, dan bahkan bagaimana dengan ilmu ekonomi?

Kalau Edy Tanzil menilap uang negara (Bapindo) dengan melibatkan pejabat negara, bagaimakah para sosiolog, ahli hukum, antropolog, dan terutama

Dur, dan kalangan budayawan lainnya membangun puisi di TIM dengan mendapat bayaran yang memadai (bahkan Rendra diperbesar di Yogyakarta), kebetulan mereka memiliki puisi yang memiliki muatan politik, apakah itu merupakan peristiwa politik yang isolatif, ataukah semata-mata peristiwa budaya, ataukah hanya sekadar aktivitas "ngamen" dalam tingkat tinggi?

Hal itu bukan semata tanggung jawab ilmuwan politik menjelaskannya. Oleh karena itu, kalau Anda mempertanyakan apakah ilmu politik masih berguna, saya pun dapat mengajukan pertanyaan yang sama terhadap semua ilmu sosial lainnya.

(Sambungan dari halaman 4)

babat, mengapa nilai tukar petani semakin lemah, mengapa pemerintah memberikan proteksi yang besar terhadap industri dalam negeri, mengapa harga telepon genggam di Indonesia dua kali lebih mahal daripada harga barang yang sama di Singapura? Dan sejauh mana mengapa mengapa lainnya.

Akan tetapi hal itu bukan se-

mata-mata tugas kalangan ekonomi, karena para sosiolog, para ahli hukum, para psikolog, ilmuwan politik, dan bahkan antropolog, mempunyai tanggung jawab yang sama.

Kalau misalnya Rendra, Emilia, Darmanto Yatman, Kiki Mustafa Bisri, Umar Kayam, Gus

* Afan Gaffar, staf pengajar Fisi-
pol UGM, Yogyakarta.

Sosiologi —

ma kalangan ekonom memberikan penjelasan tentang hal tersebut?

Para ekonom dan teknokrat-teknolog yang seharusnya memberikan penjelasan dengan baik dan benar tentang ideologi pembangunan yang sudah berjalan selama lima Pesta, mengapa sampai terjadi penumpukan kekayaan pada sejumlah kecil orang, mengapa masih ada 27 juta penduduk yang masih misir, mengapa sampai ada kredit macet yang jumlahnya puluhan trilyun, mengapa urang negara dan masyarakat sudah mencairai 90 miliar dollar, mengapa perlunya dibangun jalantol, mengapa perlu membangun pusat terbang, mengapa hutan di-

(Bersambung ke hlm. 5 kol. 7-9)